PESTA ULAR COBRA

Oleh YB Mangunwijaya

Sumber: Kompas, Senin, 3 Maret 1997

Kehidupan bangsa, bukan cuma para murid atau mahasiswa, para manajer atau perwira, kaum elite atau yang berduit, ataupun bangsa saja, melainkan kehidupan bangsa. Termasuk tata-politik, tata-ekonomi, tata-jurnalistik, tata-pendidikan, tata-lalu-lintas, tata-pasar, tata-pertanian, tata-transmigrasi, tata-beragama dan seterusnya dan sebagainya.

Pesta Ular Kobra

Oleh YB Mangunwijaya

PERNAH seorang mahasiswi Amerika saya tanyai, bagi dia peristiwa pemilu Presiden USA punya arti apa? - Fun, just fun. jawabnya. Bukan ekspresi demokrasi? Mana bisa demokrasi, praktis hanya dapat memilih antara dua partai yang itu-itu saja. Wah, kalau itu ukurannya, Indonesia lebih demokratis dari negara anda. Tidak ada negara yang demokratis, ujarnya skeptis.

Mungkin ada perkecualian, pikirku, suku Kubu, Indian atau orang-orang Bush gurun Afrika, seperti yang ditunjukkan dalam film *The Gods must be Crazy* yang lucu itu. Tetapi suku bukan negara. Kembali ke Indonesia, pemilu disebut pesta rakyat. Mungkin sama mungkin tidak dengan *fun, just fun* tadi. Tetapi mana mungkin ada pesta dengan pasukan-pasukan anhuha (anti huru-hara) yang sudah siaga dengan peluru, anjing dan... nah ini *the greatest invention of the century*: ular kobra? Mungkin saja. Di Indonesia, seperti di Amerika, semuanya mungkin. Saya dapat membayangkan betapa ramai serba sorak-sorai dan gelak ketawa nantinya bila ular-ular kobra itu dilepas oleh pasanhuha dan disambut oleh para demonstran yang tentu saja sudah membawa pawang- pawang ular jitu yang terdapat banyak di negeri ini, lalu para kobra itu membalik justru mengejar pasanhuha. ltu jika ular kobranya tidak berwarna kuning.

Sebetulnya ular mudah diatasi dengan tongkat panjang bercabang. Dan lagi, ular kobra pun bukan perkecualian, tidak pernah mengejar manusia. ltu hanya di cerita-cerita anak-anak saja. Ular selalu lari dari keramaian manusia. Hanya jika ia terjepit atau terkejut terinjak atau kepergok mendadak, baru ia tegak mendesis menyembur racun, tetapi pasti lalu lari. Ke mana? Tergantung tadi, ularnya kuning atau tidak, coba lihat nanti bila *the greatest show of the century* itu dimulai. Pasti para wartawan luar-negeri amat senang dengan peristiwa cobra-fun nanti.

Namun kembali pada soal demokrasi, apakah di Indonesia demokrasi masih mungkin? Yang saya maksud bukan demokrasi yang disebut liberal barat atau komunis (RRC dan Vietnam pun menyebut diri republik demokratik) atau lainnya, melainkan demokrasi dalam arti asli. Yakni pemerintahan atau sistem pengambilan keputusan, penataan negara, tidak oleh *a happy few* sedangkan *a servile crowd* tinggal menelan apa yang diputuskan dari atas, tetapi oleh rakyat. Bahkan sering langsung oleh suatu referendum seperti yang berjalan di Swiss dan negara-negara lain yang sudah dewasa punya pengalaman lama tentang perbincangan bersama yang jujur dan adil.

United Kingdom misalnya, Nederland, Belgia, Denmark, Norwegia, Swedia, Spanyol, Jepang yuridis bertahta kerajaan, tetapi substansial praktis mereka republik. Tetapi Mesir, Siria, Irak, Zaire dan beberapa negara di Asia resminya republik, tetapi substansial praktis kerajaan, bahkan ada yang kerajaan mutlak. Demokrasi di situ ya cuma baju kelambu belaka. Bukan baju yang sebetulnya. Ada lagi sistem yang dalam beberapa ekspresinya demokratis tetapi dalam hal-hal yang amat pokok sama sekali tidak demokratis. Apakah lalu demokrasi yang ideal itu belum pernah ada? Sebaiknya kita jangan bertanya dengan rumusan begitu. Lagi tidak perlu. Asal baik, jujur dan realistis.

Substansi

Kata demokrasl memang tidak menolong banyak. Terlalu dibebani bahkan dinodai oleh segala tafsiran-enaknya sendiri; topeng yang tidak adil bahkan melawan arti demokrasi yang sebenarnya. Begitu juga kata lawannya, komunisme. Maka lebih baik kita (khususnya generasi muda) berwacana soal tulang dagingnya, tidak cuma kulitnya saja. Yakni pencarian sistem tata negara yang cukup adil dan cukup mampu mendewasakan semua warga negaranya pada posisi yang cukup membahagiakan hidupnya. Cukup atau lebih dari cukup, tidak perlu yang ideal. Atau: yang tidak menghendaki dan tanpa henti memerangi eksploitasi manusia oleh manusia lain dalam tata negaranya, tata ekonomi serta kulturalnya. Yang meminimkan cara-cara kekerasan dan paksaan. Atau: yang membendung berbagai bentuk kekuasaan menjadi pemusatan kekuatan yang praktis serba mendikte keputusan-keputusan vital. Yang semakin dan semakin mengurangi jarak antara sesama warga negara dalam hal pendidikan, informasi, kesempatan, peluang ekonomi dan penghasilan real, jalan-jalan pembudayaan serta pemekaran diri, sehingga tidak sulit menjadi manusia yang seutuh mungkin. Atau: yang tidak membiarkan mulut senjata api (kini ditambah mulut ular kobra) ikut berbicara dalam perbincangan yang dari kodratnya dilakukan oleh mulut-mulut di wajah manusia atau jari-jemari tangan sebagai sarana ekspresi persuasi nalar, cita rasa dan hati nurani manusia. Juga yang tidak digenangi dan dirembesi jiwa korup, mental mencuri, bohong, main tipu, suka yang semu, urik, tidak kenal fair play,dan sebagainya. Suatu deskripsi seluas mendetail mungkin jauh lebih berguna daripada slogan-slogan atau label-label yang terlalu umum lagi terlalu pendek sempit untuk menggambarkan realitas yang sangat luas dan kompleks. Demikianlah kita tidak lagi terkacau oleh cap-cap seperti demokrasi liberal, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, demokrasi terbina, demokrasi Kuomintang, Triad Yakusha, juga demokrasi Pancasila dan sebagainya yang bisa ditafsir macam-macam menurut siapa yang kebetulan sedang kuasa, sehingga perbincangan menjadi simpang-siur. Dengan akibat para penguasa malah leluasa berkuasa sesuka mereka.

Namun harus diakui, bahwa istilah demokrasi, meski sangat mengacau, sementara terpaksa masih sering kita pakai, karena sudah telanjur beredar di kalangan sekian milyar manusia yang biasanya tidak (sempat dan mampu) refleksif tentang isi sebenarnya dari suatu istilah. Ini masalah penting Sprachspiel atau permainan kata yang sudah diingatkan oleh filsuf Wittgenstein (silakan baca: Kompas 14 Sept. 96, hlm

4), dan yang sudah berabad-abad mengacau jalan dialog di seluruh dunia. Tetapi apa boleh buat, inilah realita yang kita hadapi. Maka bila dalam esai ini pun saya pakai istilah demokrasi meskipun cukup mengacaukan, saya hanya percaya kepada kecerdasan para pembaca budiwati-budiwan untuk menyaring sendiri sari emasnya dari logam-logam lain yang serba tidak bersih.

Prasyarat tanah-tumbuh

Kita semua, khususnya generasi muda berbicara banyak tentang dan memperjuangkan demokrasi. Itu amat terpuji. Cuma demokrasi bagaikan tanaman hidup memerlukan tanah-tumbuh yang pas. Padi mati di tanah kering. Gandum atau sorgum tidak. Apakah (salah satu) syarat mutlak demokrasi? Suatu bangsa yang cukup rasional dan cukup cerqas. Bangsa yang emosional melulu dan setiap kali mudah terbakar retorika atau isu, tidak dapat berdemokrasi. Juga bangsa yang bodoh impulsif bermental instan saja sehingga sulit memperhitungkan akibat dari sebabnya, juga tidak mungkin berdemokrasi. Bangsa yang mudah mata-gelap, mengamuk dan "hantam kromo," yang berjiwa "pukul dulu urusan belakang" mustahil berdemokrasi. Bangsa atau paling sedikit orang yang tidak sportif, tidak fair play,dan marah ngawur jika kalah bermain sepak bola atau apalah, juga tidak dapat berdemokrasi. Bangsa yang amat mudah tersinggung dan tidak tahu humor sehat, yang menomorsatukan gengsi sebagai nilai hidup atau yang merasa diri bangsa yang paling hebat, paling Pancasila di seluruh dunia, bapgsa yang super patriot dan ultra-nasionalis, dalam bahasa Jawa (maaf) adigang adigung adiguna (mempongahkan kekuasaan, keluhuran dan kemampuan diri) juga sangat sulit berdemokrasi.

Tetapi sebaliknya bangsa yang selalu pamer sombong merasa diri paling ramah, paling lemah lembut, paling murah tersenyum, siapa tahu itu bangsa yang minder, yang penakut, yang penjilat, yang perangkak, yang ada bunyi sedikit lalu bertiarap, (celakanya jika berjiwa pelacur) juga sulit berdemokrasi. Manusia tuan besar, maharaja maupun kuli jongos babu sama-sama tidak berbakat untuk berdemokrasi. Daftar kendala demokrasi masih banyak, dapat didiskusikan sendiri oleh generasi muda. Generasi tua juga? Wah, orang-tua apalagi yang lansia teramat sulit berdemokrasi. (Perkecualian tetap ada). Bukan karena mereka berperangai buruk, mereka baik-baik saja, tetapi kodrat atau paling sedikit pembawaan semua orang-tua itu konservatif (bahasa Latin: *conservo* = melestarikan) merasa wajib melestarikan yang ada, apalagi yang dengan susah payah sudah beliau perjuangkan sampai tua. Jadi bagi beliau demokrasi itu ya yang sudah ada ini. Abadi. Kita jangan marah atau menggerutu bila orang lansia konservatif, karena dunia fase hidup beliau memang persiapan diri ke arah dunia keabadian.

Prasyarat kecerdasan

Namun sungguh nyata, mengambil yang paling menentukan, demokrasi alias negara hukum mustahil bila bangsa, atau lebih tepat kehidupan bangsa masih bodoh, dungu, tolol, sempit pikir. Hasilnya cuma demokrasi orang-orang bodoh alias anarki. Oleh karena itu kita mengerti mengapa para bapak pendiri RI 17 Agustus 1945 eksplisit

beramanat dalam Mukadimah UUD 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan, bukan membuat pandai, pintar, ahli, cerdik, lihai, atau terampil, apalagi kuasa, kaya atau bergengsi dan sebagainya. (Tentang perbedaan antara cerdas dan pandai, pintar, maafkali lain saja).

Kehidupan bangsa, bukan cuma para murid atau mahasiswa, para manajer atau perwira, kaum elite atau yang berduit, ataupun bangsa saja (sekian puluh/ratus juta individu), melainkan kehidupan bangsa. Termasuk tata-politik, tata-ekonomi, tata-jurnalistik, tata-pendidikan, tata-lalu-lintas, tata-pasar, tata-pertanian, tata-transmigrasi, tata-beragama dan seterusnya dan sebagainya. Apakah kehidupan bangsa selama 30 tahun terakhir ini (sekurun satu generasi) sudah tampak buah-buah pencerdasannya? Dari fakta-fakta kekerasan dan hal-hal nyata lain serta sekian pernyataan oleh sekian pejabat tinggi serta macam-macam rekayasa selama ini, dengan simbol spektakuler yang tiada tandingannya di seluruh dunia, yakni ancaman maut ular kobra untuk menghadapi demo (tanggung bahan tertawaan di kalangan para duta besar sekaligus pembuat jengkel para menlu, ahli hukum, apalagi LSM HAM dunia internasional), tampaknya belum.

Kekerasan sebenarnya sebentuk kebodohan juga. Manusia yang cerdas dengan sendirinya tidak suka kekerasan, karena manusia yang suka kekerasan lebih dekat dengan dunia binatang buas daripada mahluk manusia yang bermartabat. Jika kekerasan bodoh menjawab kekerasan yang bodoh juga, akan ke mana nasion kita? Saya rindu pada Generasi 1908 dan 1928 yang cerdas, amat cerdas, lagi berbudi luhur. Yang malu untuk bermain tidak fair dan karena cerdas selalu menghindari kekerasan dan karena itu berjiwa demokrat. Yang tidak pernah punya pikiran berpesta demokrasi dengan hidangan ular kobra. Ya, saya rindu pada Generasi 2008 dan 2028 (simbol) yang mudah-mudahan sanggup menciptakan Indonesia Serba Baru yang cerdas dan yang karena itu manusiawi dan demokratik.

YB Mangunwijaya
Sumber: Kompas, Senin, 3 Maret 1997